

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI MELALUI WARUNG KEJUJURAN DI SMP KELUARGA KUDUS

Nuriani Laura Malau Gurning¹

Haris Mudjiman²

Samsi Haryanto³

¹⁾Mahasiswa Magister Teknologi Pendidikan Pascasarjana FKIP UNS

²⁾Dosen Pembimbing Magister Teknologi Pendidikan Pascasarjana FKIP UNS

³⁾Dosen Pembimbing Magister Teknologi Pendidikan Pascasarjana FKIP UNS

Email: lauramalaugurning@ymail.com

ABSTRACT

Many ways done by the government to deal with corruption have not resulted as expected. Dealing with corruption is the responsibility of all citizens whether as an individual or as an organization. One of the preventive ways is by education. Anti-corruption education must be implanted from elementary school to college. Honesty is one of the ways that can be implanted. The habituation of honest attitude can be done by honesty stall. The objectives of this research are (1) to describe the background of the implementation of honesty stall as the implementation of anti-corruption education in SMP Keluarga Kudus (2) to describe how the implementation of honesty stall as the implementation of anti-corruption education in SMP Keluarga Kudus is (3) to describe the obstacles and the efforts in dealing with the obstacles of the implementation of honesty stall as the implementation of anti-corruption education in SMP Keluarga Kudus (4) to describe the result of the implementation of honesty stall as the implementation of anti-corruption education. This research uses qualitative descriptive method. The research location is in SMP Keluarga Kudus. The data sources are human, event and documents. The techniques of collecting data used in this research are observation, interview and documentation. Data analysis used here are Miles and Huberman's interactive model with 3 steps namely data reduction, data presentation and conclusion drawing. Results: (1) The background of honesty stall is as the habituation and implant of anti-corruption that has been accepted by the students in anti-corruption education subject. (2) Honesty stall is addressed to all school citizens, selling students' needs. This honesty stall has no keeper so that students are independent in doing transaction. The roles of homeroom teachers are as facilitators who teach Anti-Corruption Education in the class. The evaluation of honesty stall is done by analyzing the financial report from the organizer and supervised by all school citizens. Honesty stall is maintained and used effectively as a way of implementation of Anti-Corruption Education. (3) The obstacles in implementing honesty stall are; there are some students who are cheating, the organizer still has to teach in the class, and sometimes they feel bored. The ways to deal with these problems are by giving understanding in classroom while having Anti-Corruption Subject and giving information while having flag ceremony on Monday, and encouraging the teachers, each other when they start feeling bored. (4) It can be concluded that honesty stall in SMP Keluarga Kudus has run well because the modal can grow and hold out for seven years. It can be said that it successfully develops students' honesty, at least when they study in SMP Keluarga Kudus. Although there are still some obstacles faced such as cheating, the teachers realize that the implant of honesty to the students is not as easy as turning our palm around and the result cannot be seen in short time.

Key words: Implementation of Anti-Corruption Education, Honesty Stall.

PENDAHULUAN

Korupsi di Indonesia bisa dikatakan merajalela. Hampir setiap hari selalu ada berita tentang tertangkapnya pelaku korupsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005) korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi atau orang lain.

Korupsi secara sederhana dapat diartikan sebagai perbuatan menggelapkan dana untuk kepentingan sendiri. Sistem birokrasi di Indonesia telah menjadi lahan subur bagi benih korupsi sehingga Korupsi harus dipandang sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang oleh karena itu memerlukan upaya luar biasa pula untuk memberantasnya. Transparency International setiap tahun mengeluarkan *Corruption Perception Index* / indeks persepsi korupsi dari negara-negara di dunia. Skala Indeks Persepsi Korupsi dimulai dari 1 sampai 10, semakin besar nilai IPK suatu negara maka semakin bersih negara tersebut dari tindakan korupsi. Dari data yang dibuat kita bisa mengetahui bahwa secara umum negara Indonesia menduduki posisi buruk.

Tabel 1. Indeks persepsi korupsi Indonesia (lampiran 1)

Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberantas korupsi belum membuahkan hasil seperti yang diharapkan, namun bukan berarti

tidak ada usaha ke arah itu. Pemberantasan korupsi menjadi tanggung jawab seluruh warga negara baik sebagai pribadi maupun lembaga. Pemberantasan korupsi menurut penulis selain menjadi jalur hukum juga dapat dilakukan melalui tindakan preventif atau pencegahan di masyarakat, keluarga, maupun melalui pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Jalur pendidikan pada hakekatnya adalah untuk membentuk karakter, watak, siswa yang bermartabat dan berakhlak mulia. Pada dasarnya pendidikan di sekolah hanya mengambil sebagian peran dari keseluruhan proses pendidikan seorang siswa. Pendidikan pada aras keluarga, pada komunitas dan masyarakat juga mempunyai peran penting dalam proses pendidikan secara umum. Fungsi dan tujuan Sistem Pendidikan Nasional menurut UU no. 20 tahun 2003 adalah “*mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.*”

Menurut Wibowo (2013) pendidikan harus mampu mentransfer perangai buruk manusia pada hal-hal

positif dengan kata lain merubah manusia yang berkarakter buruk menjadi berkepribadian dan berkarakter mulia.

Salah satu cara untuk melaksanakan upaya preventif atau pencegahan tindak korupsi dapat ditempuh melalui pendidikan antikorupsi. Pendidikan antikorupsi adalah usaha sadar untuk memberi pemahaman dan mencegah terjadinya perbuatan korupsi yang dilakukan dalam proses pembelajaran di sekolah. Pendidikan antikorupsi akan lebih efektif apabila diterapkan pada siswa sejak usia dini. Pendidikan antikorupsi pada dasarnya dapat dilakukan pada pendidikan informal di lingkungan keluarga, pendidikan non formal dan pendidikan formal pada jalur sekolah, namun karena otoritas yang dimiliki dan kultur yang dipunyai, jalur formal atau sekolah dipandang lebih efektif untuk menyiapkan generasi muda yang berperilaku antikorupsi (Handoyo, 2009 : 13).

Pendidikan antikorupsi haruslah bermakna belajar dengan mengalami atau *experiential learning* jadi tidak sekedar mengkondisikan para peserta didik hanya untuk tahu, namun juga diberi kesempatan untuk membuat keputusan dan pilihan untuk dirinya sendiri (Susanti dkk: 2005: 1).

Materi pendidikan antikorupsi di sekolah diharapkan tidak hanya pemberian wawasan di ranah kognitif (materi) tidak pula hanya sekedar pemahaman dan menghafal, namun lebih dari itu, pendidikan antikorupsi menyentuh pula ranah afektif dan psikomotor, sehingga membentuk sikap dan perilaku antikorupsi pada siswa menuju penghayatan dan pengamalan nilai-nilai antikorupsi. Penerapan pendidikan antikorupsi di sekolah diharapkan dapat menjadi tempat untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran, kedisiplinan, keterbukaan dan tanggung jawab kepada siswa sejak dini (Handoyo, 2009 : 1).

Keprihatinan para pendidik akan maraknya korupsi di negeri ini dan kesadaran untuk memperbaiki bangsa dari segi pendidikan dengan mendidik siswa atau peserta didik agar bertanggung jawab pada perbuatannya itulah maka SMP Keluarga Kudus telah menerapkan pendidikan antikorupsi sejak tahun 2005 bekerjasama dengan Universitas Katolik Soegijapranoto Semarang (Kompas News, 2010). Penerapan atau implementasi pendidikan antikorupsi yang diberikan kepada siswa antara lain dengan mengadakan warung kejujuran yang mulai diselenggarakan tahun pelajaran 2006 / 2007, di mana mereka diajarkan untuk belajar mengalami sendiri membeli

barang yang mereka inginkan dan bertanggung jawab atas tindakannya dengan tetap membayar dengan jujur apa yang mereka beli tanpa ada yang mengawasi.

Belum banyak sekolah di Jawa Tengah khususnya di Kabupaten Kudus mempunyai atau menyelenggarakan warung kejujuran, namun SMP Keluarga Kudus telah berani memulai pembelajaran pendidikan antikorupsi dan menyelenggarakan warung kejujuran sebagai penerapan atau implementasi dari pendidikan antikorupsi walaupun sadar bahwa pemberantasan korupsi melalui pendidikan merupakan investasi jangka panjang dan tidak dapat dilihat dalam sekejap (Wibowo: 2013) bahkan sebelum Kementrian Pendidikan Nasional menyiapkan kurikulum pendidikan antikorupsi. Implementasi pendidikan antikorupsi melalui warung kejujuran inilah yang akan menjadi fokus penelitian penulis. Penulis akan berusaha mengetahui bagaimana penyelenggaraan warung kejujuran di SMP Keluarga Kudus dapat terselenggara atau bertahan dari tahun 2006 sampai 2012 dan menjadi salah satu sarana efektif untuk mengimplementasikan pendidikan antikorupsi di SMP Keluarga Kudus.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul

“Implementasi Pendidikan Antikorupsi Melalui Warung Kejujuran di SMP Keluarga Kudus.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) latar belakang pelaksanaan warung kejujuran sebagai implementasi pendidikan antikorupsi di SMP Keluarga Kudus (2) bagaimana pelaksanaan warung kejujuran sebagai implementasi pendidikan antikorupsi di SMP Keluarga Kudus (3) apa saja hambatan dan bagaimana upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan warung kejujuran sebagai implementasi pendidikan antikorupsi di SMP Keluarga Kudus (4) bagaimana hasil pelaksanaan warung kejujuran sebagai implementasi pendidikan antikorupsi di SMP Keluarga Kudus.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berjudul Implementasi Pendidikan Antikorupsi melalui Warung Kejujuran di SMP Keluarga Kudus Jalan Yos Sudarso 234 Kudus. Pelaksanaan penelitian secara keseluruhan sejak praobservasi sampai selesai April - September 2013.

Penelitian mengenai Penyelenggaraan Warung Kejujuran sebagai Implementasi Pendidikan Antikorupsi di SMP Keluarga Kudus adalah penelitian deskriptif kualitatif.

Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain (Moleong, 2002).

Sumber data dalam penelitian ini meliputi nara sumber / informan, tempat dan aktivitas dan dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan wawancara mendalam, observasi, dokumentasi dan triangulasi.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis interaksi. Langkah langkahnya adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Data yang terkumpul dalam penelitian ini kemudian dianalisis berdasarkan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1992).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Latar Belakang Pelaksanaan Warung Kejujuran Sebagai Implementasi Pendidikan Antikorupsi Melalui Warung Kejujuran Di SMP Keluarga Kudus

Warung kejujuran dilaksanakan mulai tahun pelajaran 2006 / 2007 sebagai bentuk konkrit dari usaha SMP Keluarga Kudus dalam mengimplementasi pendidikan antikorupsi pada siswa / peserta didik yang telah diterima siswa /

peserta didik dalam pembelajaran pendidikan antikorupsi setiap hari Sabtu oleh walikelas. Melalui warung kejujuran diharapkan siswa dapat menerapkan atau mengamalkan sendiri kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Modal awal warung kejujuran berasal dari modal sekolah sendiri tanpa bantuan dari pihak manapun. Menurut Handoyo (2007) pendidikan antikorupsi pada dasarnya dapat dilakukan pada pendidikan informal di lingkungan keluarga, pendidikan non formal, dan pendidikan formal di sekolah, namun karena otoritas yang dimiliki dan kultur yang dipunyai, jalur formal atau sekolah dipandang lebih efektif untuk menyiapkan generasi muda yang berperilaku antikorupsi.

SMP Keluarga sadar bahwa sekolah memiliki kemampuan untuk mendidik generasi yang antikorupsi, maka SMP Keluarga Kudus mencanangkan pendidikan antikorupsi dan mendirikan warung kejujuran sebagai praktek siswa / peserta didik menerapkan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari.

Pelaksanaan Warung Kejujuran Sebagai Implementasi Pendidikan Antikorupsi Melalui Warung Kejujuran Di SMP Keluarga Kudus

Warung kejujuran di SMP Keluarga Kudus adalah warung yang menjual barang-barang keperluan siswa, dimana tidak ada yang menjaga sehingga siswa melakukan

sendiri transaksinya. Mengambil barang , membayar dan mengambil uang kembali sendiri tanpa ada yang mengawasi. Warung kejujuran ditujukan bagi seluruh warga sekolah, secara khusus ditujukan bagi siswa / peserta didik untuk melatih siswa agar jujur. Djaelani (2008) mengatakan warung kejujuran bisa menjadi ajang pembelajaran bagi generasi muda tentang kejujuran terhadap dirinya sendiri, yang pada akhirnya bermuara pada lahirnya generasi yang menghormati kejujuran sekaligus memunculkan generasi antikorupsi.

Manfaat warung kejujuran antara lain sebagai tolok ukur keberhasilan pembelajaran antikorupsi yang dipraktekkan melalui warung kejujuran dan membiasakan seluruh warga sekolah agar berperilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari seperti tidak mencontek , datang tepat waktu dan lain-lain.

Pendidikan antikorupsi haruslah bermakna belajar dengan mengalami atau *experiential learning* jadi tidak sekedar mengkondisikan para peserta didik hanya untuk tahu, namun juga diberi kesempatan untuk membuat keputusan dan pilihan untuk dirinya sendiri (Susanti: 2005). Jadi di warung kejujuran peserta didik diberikan kesempatan untuk menentukan sikap, akan berbuat jujur atau melakukan kecurangan.

Sebagai sebuah program di sekolah sosialisasi dilakukan dilakukan dengan berbagai cara untuk mengenalkan pendidikan antikorupsi khususnya keberadaan warung kejujuran agar diketahui oleh seluruh siswa terutama siswa baru. Sosialisasi dilakukan antara lain di saat Masa Orientasi Peserta Didik (MOPD), penerimaan raport, juga dengan mengadakan berbagai cara yang berbau antikorupsi dan diliput oleh media cetak maupun media elektronik.

Pelaksanaan warung kejujuran tidak terlepas dari peran walikelas sebagai fasilitator yang mengajarkan materi pendidikan antikorupsi di kelas agar peserta didik menerapkan nilai-nilai kejujuran di warung kejujuran.

Bentuk evaluasi yang dilakukan oleh pihak sekolah adalah dengan menganalisis laporan keuangan dari pengelola warung kejujuran dan melakukan pengawasan di dalam warung kejujuran oleh semua warga sekolah. Sesuai pendapat Arikunto (2009) bahwa evaluasi program adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melihat tingkat keberhasilan siswa, maka evaluasi warung kejujuran bertujuan untuk mengukur keberhasilan dalam menanamkan perilaku antikorupsi pada peserta didik.

Warung kejujuran di SMP Keluarga efektif sebagai sarana untuk menerapkan

nilai-nilai kejujuran. Indikatornya adalah pernyataan siswa bahwa dengan adanya warung kejujuran membuat mereka menjadi lebih jujur. Selain itu dilihat dari waktu pelaksanaannya yang cukup lama, dan perkembangan modal yang bertambah warung kejujuran efektif untuk dipertahankan dan dipakai sebagai sarana implementasi pendidikan antikorupsi.

Hambatan dan Usaha Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Warung Kejujuran Sebagai Implementasi Pendidikan Anti Korupsi Di SMP Keluarga Kudus

Sebagai sebuah usaha pembiasaan sikap kejujuran pada siswa sejak tahun 2006 - 2013 pasti banyak hambatan yang dialami oleh para pengelola warung kejujuran. Hambatan-hambatan itu diantaranya adalah masih adanya siswa yang melakukan kecurangan dalam bertransaksi, siswa lupa atau sengaja tidak menulis dalam buku kejadian sehingga mempersulit pengelola dalam mengecek keberadaan barang. Hambatan dari pihak guru adalah kurang optimalnya pengelola karena sebagai guru masih harus mengajar di kelas dan guru-guru kadang merasa jenuh atau bosan karena program warung kejujuran ini seperti menambah pekerjaan saja karena tidak semua sekolah di Kabupaten Kudus mempunyai program warung kejujuran.

Usaha atau upaya mengatasi hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan warung kejujuran, siswa selalu diberi pengertian terus-menerus. Pemberian pengertian atau sosialisasi tentang pentingnya kejujuran dilakukan pada hari Sabtu pada saat pembelajaran antikorupsi di kelas, ataupun pada saat upacara diumumkan telah terjadi kecurangan di warung kejujuran ataupun mengingatkan siswa untuk selalu menulis di buku kejadian bila melakukan transaksi di warung kejujuran. Dalam beberapa kasus siswa ada yang mengaku bahwa dia telah melakukan kecurangan. Sementara upaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh pengelola yang juga harus mengajar di kelas diatasi dengan pengecekan barang dilakukan sepulang sekolah, dan dibantu guru-guru yang lain dalam pengawasan warung kejujuran. Perasaan jenuh atau bosan diatasi dengan saling menguatkan antara sesama guru, dan kesadaran bahwa penanaman nilai-nilai antikorupsi kepada siswa tidak semudah membalikkan telapak tangan.

Hasil Pelaksanaan Warung Kejujuran Sebagai Implementasi Pendidikan Antikorupsi di SMP Keluarga Kudus

Keberhasilan pelaksanaan warung kejujuran di SMP Keluarga Kudus dapat dibagi menjadi keberhasilan jangka pendek dan jangka panjang. Dalam

jangka pendek keberhasilannya dapat dilihat dari:

1. siswa tahu bahwa warung kejujuran merupakan sarana pendidikan antikorupsi
2. siswa tahu bahwa kejujuran adalah sifat atau karakter yang harus dimiliki
3. siswa mau mengakui bahwa mereka pernah tidak jujur.
4. modal warung kejujuran tidak habis bahkan bisa berkembang.

Indikatornya adalah warung kejujuran dapat berkembang dengan modal awal sekitar dua juta dan dapat bertahan hingga kurang lebih 7 tahun. Kecurangan masih ada tapi persentasenya semakin lama semakin kecil. Andai kata siswa - siswa SMP Keluarga Kudus banyak yang tidak jujur bisa dipastikan warung kejujuran akan bangkrut seperti yang terjadi di SMU 01 Banyuwangi Kabupaten Tulungagung yang hanya bertahan selama 20 hari karena dikorupsi oleh siswanya (Okezone, diakses 30 Agustus 2013).

Untuk jangka panjang, kejujuran yang sudah ditanamkan selama siswa / peserta didik sekolah di SMP Keluarga Kudus diharapkan menjadi karakter yang tertanam seumur hidup. Namun tidak ada indikator yang dapat menjamin bahwa nilai-nilai kejujuran itu akan menjadi karakter mereka seterusnya. Banyak hal bisa terjadi setelah siswa lulus

dari SMP Keluarga Kudus. Seperti dikatakan Wibowo (2013) bahwa pemberantasan korupsi melalui pendidikan merupakan investasi jangka panjang, yang tidak dapat dilihat dalam sekejap sehingga agar pendidikan antikorupsi bisa optimal perlu dukungan dari segenap elemen bangsa dan butuh waktu yang lama.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang implementasi pendidikan antikorupsi melalui warung kejujuran di SMP Keluarga Kudus maka dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1. Warung Kejujuran yang telah menjadi ciri khas SMP Keluarga, merupakan implementasi atau penerapan dari usaha penanaman atau pembiasaan nilai-nilai antikorupsi yang telah siswa/ peserta didik dapatkan dari pembelajaran pendidikan antikorupsi yang telah didapat peserta didik di kelas. Implementasi pendidikan antikorupsi di SMP Keluarga lebih menekankan pada pembiasaan yang sesuai dengan perilaku antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai antikorupsi antara lain kejujuran, tanggung jawab, keberanian, keadilan, keterbukaan, disiplin, kesederhanaan, kerja keras dan kepedulian, dan

warung kejujuran dipilih menjadi salah satu alternatif penerapannya.

2. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan warung kejujuran dapat dibagi hambatan dari siswa dan hambatan dari guru. Hambatan dari siswa, pertama masih ada siswa yang tidak jujur ketika bertransaksi di warung kejujuran. Ketidakjujuran diantaranya dilakukan dengan mengambil barang tanpa membayar, mengambil uang, menulis nama temannya di buku bon, sehingga temannya yang ditagih untuk membayar, . Kedua buku kejadian yang tidak diisi oleh siswa ketika bertransaksi sehingga menyulitkan pengelola dalam pengecekan barang dan penghitungan uang.

Hambatan dari guru , pertama berupa kesulitan waktu dari pengelola warung kejujuran dalam melakukan pengawasan di warung kejujuran karena masih harus mengajar di kelas, kedua kadang muncul rasa jenuh atau bosan

3. Warung kejujuran di SMP Keluarga bisa dikatakan berhasil karena bisa berlangsung hingga memasuki tahun ketujuh. Ini merupakan prestasi tersendiri karena sebagai sekolah yang pertama kali mengadakan pendidikan antikorupsi dan warung kejujuran di Kabupaten Kudus, hanya dengan

modal dari sekolah sekitar dua juta rupiah, warung kejujuran di SMP Keluarga Kudus dapat berkembang dengan pesat. Ini menandakan siswa/peserta didik telah mengimplimentasikan pendidikan anti-korupsi yang mereka terima melalui warung kejujuran paling tidak selama mereka menuntut ilmu di SMP Keluarga Kudus. Pemberantasan korupsi melalui pendidikan adalah investasi jangka panjang jadi hasilnya tidak bisa dilihat segera. Butuh waktu bertahun-tahun untuk mengetahui apakah usaha penanaman nilai antikorupsi berhasil atau tidak pada setiap siswa, namun yang penting bagi guru-guru di SMP Keluarga Kudus mereka telah berusaha melakukan sesuatu hal yang positif.

Implikasi Kebijakan

1. Pendidikan antikorupsi melalui warung kejujuran perlu dilanjutkan dan disebarluaskan ke sekolah-sekolah lain di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus.
2. Warung kejujuran adalah warung dimana transaksinya dilakukan sendiri oleh pembeli tanpa ada penjaga atau kasir. Pembeli mengambil sendiri barang yang dibutuhkan dan memasukkan uang ataupun mengambil pengembalian uang sendiri tanpa diawasi.

Saran

Saran yang peneliti ajukan dalam penelitian tentang implementasi pendidikan antikorupsi melalui warung kejujuran di SMP Keluarga Kudus yaitu:

1. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga menginstruksikan pada sekolah - sekolah lain untuk mencontoh SMP Keluarga Kudus melaksanakan pendidikan antikorupsi melalui warung kejujuran, sebab belum banyak sekolah di Kabupaten Kudus yang memasukkan pendidikan antikorupsi dalam pembelajarannya maupun mempunyai warung kejujuran.
2. Karena ciri khas warung kejujuran adalah tidak adanya penjaga maupun kasir sehingga siswa melakukan transaksi sendiri, mengambil barang, membayar atau mengambil uang pengembalian tanpa harus berhubungan dengan siapapun, maka penulis menyarankan agar kotak uang dikembalikan seperti semula yaitu terbuka, sehingga siswa semakin tertantang untuk mengimplementasikan kejujuran mereka.
3. menambah item barang yang dijual di warung kejujuran sehingga lebih banyak juga keuntungan yang bisa didapat dan semakin menantang siswa untuk jujur.

DAFTAR PUSTAKA

- Handoyo, Eko, 2007. *Sekolah Sebagai Agen Pendidikan Antikorupsi*. Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Pokja Pendidikan Antikorupsi UNNES Semarang tanggal 18 Januari 2007
- Handoyo, Eko 2009. *Pendidikan Antikorupsi*. Semarang. Kerjasama FIS UNNES dan Widya Karya.
- Haricahyono, Cheppy. 1995. *Dimensi-dimensi Pendidikan Moral*. Semarang: IKIP Semarang Press
- Helmanita, Karlina dan Kamil, Sukron 2006. *Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Center For Study Of Religion And Culture (CSRC)
- Moleong, Alexy J, 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Okezone. 2008. *Kantin Kejujuran Tulungagung Bangkrut* (<http://news.okezone.com/read/2008/12/29/1/177767/1/kantin-kejujuran-tulungagung-bangkrut>, diakses tanggal 30 Agustus 2013)
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*.
- Wibowo, Agus. 2013. *Pendidikan Antikorupsi Di Sekolah*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar